

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO SETELAH SATU DEKADE OTONOMI DAERAH

Muhammad Safar Nasir¹

1. Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Ahmad Dahlan
safar_nasir@yahoo.com

Abstract

The purpose of study is to analyze the relationship and influence revenue (PAD) to the Gross Regional Domestic Product (GRDP). This study sampled in 2010 until 2013 the 10 areas that have the highest economic growth rate and the 10 areas that have the lowest economic growth rate. The method used is correlation and regression test panel data random effects (random effect of panel regression). Data sourced from documents retrieved and Government Finance Statistics District / City in 2009 - 2013. From the research, there is evidence that there is a positive relationship between the PAD and the GDP. Local Revenue (PAD) in the region with the highest economic growth rate has a significant effect on the GDP. However, these results inversely in the region with the lowest economic growth rate which the PAD no significant effect on the GDP.

Keyword: PAD, PDRB, panel data

JEL Classification: O47, O11, C21

1. PENDAHULUAN

Sejarah perekonomian mencatat desentralisasi telah muncul ke permukaan sebagai paradigma baru dalam kebijakan dan administrasi pembangunan sejak dasawarsa 1970-an. Pada saat ini Indonesia telah melaksanakan otonomi daerah lebih dari satu dekade yang pelaksanaannya didasari oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Dalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa pendapatan pemerintah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain yang sah. Hal tersebut menandakan bahwa pemerintah daerah diberikan seluas-luasnya untuk meningkatkan kreativitas dan inisiatif untuk menggali dan mengembangkan potensi daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Pemerintah Daerah berwenang untuk mendayagunakan potensi keuangan daerah dalam wadah PAD sebagai wujud desentralisasi. Oleh sebab itu, pemerintah harus memiliki tata pemerintahan yang baik agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Cooray, 2009). Perbandingan komposisi pendapatan daerah secara nasional dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut: agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Cooray, 2009). Perbandingan komposisi pendapatan daerah secara nasional dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut.

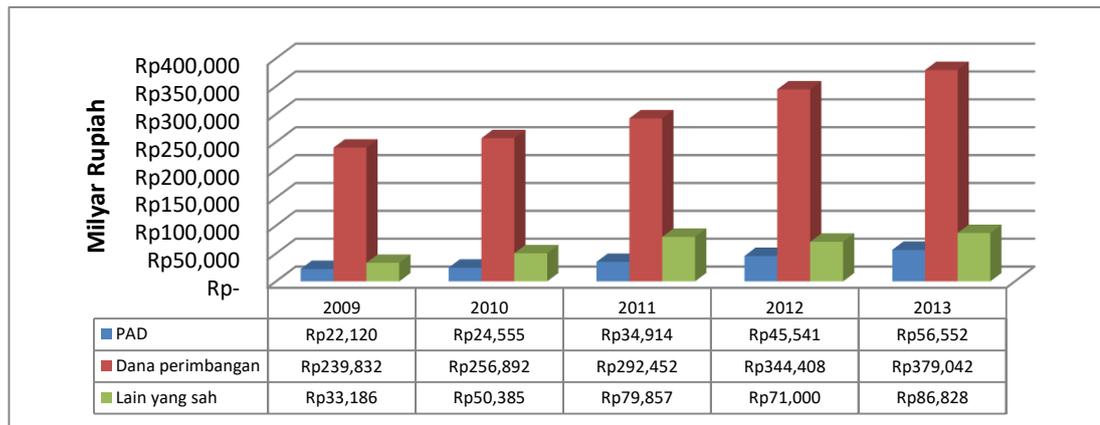
Pada gambar 1 terlihat secara nasional porsi dana perimbangan masih mendominasi setiap tahunnya (mendominasi sumber anggaran pemerintah daerah), tetapi laju pertumbuhan PAD lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan dana perimbangan. Laju pertumbuhan PAD menunjukkan trend meningkat sebesar 24,73 persen sampai 25,80 persen.

Sedangkan dana perimbangan, setiap tahunnya hanya meningkat se-

besar 12 persen sampai 16,38 persen. Sementara itu, lain-lain pendapatan yang sah meningkat dan telah mencapai pertumbuhan sebesar 37,36 persen sampai 89, 74 persen. Kemampuan keuangan daerah yang baik, sedikit ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan pemerintah pusat merupakan ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi. Menurut Zouhaier (2012) iklim yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dapat

timbul atas pemberian otonomi daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lin & Liu (2000) menunjukkan pemberian otonomi daerah berdampak sangat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan penelitian (Fadly, 2016) di Jawa Timur mengungkapkan bahwa peningkatan atau penurunan pada jumlah produk domestik regional bruto tidak memiliki efek pada pendapatan daerah.



Gambar 1. Perbandingan Komposisi Pendapatan Daerah
Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2014

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Seiring dengan bertumbuhnya Orde Baru dan reformasi, maka mulai tahun 1999 diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan terakhir diganti dengan Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Daerah otonom berwenang membuat berbagai kebijakan yang tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus mampu berorientasi pada kesejahteraan dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang muncul dalam masyarakat. Batasan mengenai konsep desentralisasi dikemukakan oleh banyak ahli pemerintahan yang didasarkan pada sudut pandang yang berbeda-beda sehingga sulit didefinisikan secara tepat.

Walaupun demikian, perlu ditengahkan beberapa batasan yang diajukan oleh ahli sebagai bahan pertimbangan dan bahasan dalam upaya menemukan definisi mendasar tentang desentralisasi dan otonomi daerah. *Handbook of Public Administration* yang diterbitkan oleh PBB menyebutkan bentuk-bentuk desentralisasi sebagai: *The two principal forms of decentralization of governmental power and functions are deconcentration to area offices of administration and devolution to state and local authorities.*

Kedua bentuk yang paling pokok dari desentralisasi kekuasaan pemerintah dan fungsi-fungsinya adalah dekonstruksi pemerintahan wilayah dan devolusi (pelimpahan kekuasaan) pada kewenangan-kewenangan pemerintah daerah. Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Menurut Leemans yang di kutip Kuncoro (2014) membedakan dua macam desentralisasi: *representative local government dan field administration*. Pemerintah daerah dimanifestasikan sebagai struktural dari desentralisasi (*political decentralization*). Sementara, desentralisasi administratif disebut dekonstruksi.

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Putro (dalam Jaya & Dwirandra, 2014) dalam menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan dari kegiatan perekonomian di mana hal tersebut berdampak pada jumlah produksi barang dan jasa yang semakin bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat.

Pemberian keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengurus, mengembangkan, dan menggali potensi yang dimiliki masing-masing daerah merupakan upaya pelaksanaan otonomi daerah guna peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Tao Zhang dalam Zhang & Zou (1998), semakin besar nilai derajat desentralisasi fiskal maka menunjukkan semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal di China.

Desentralisasi fiskal selalu memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Desentralisasi fiskal di beberapa negara berkembang dan negara transisi (1997) mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi (Vazquez & McNab, 1997). Me-

nurut Vazquez & Rider (2005) menjelaskan desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui stabilitas ekonomi makro yang dapat mengurangi laju inflasi. Pertumbuhan ekonomi daerah diproksikan dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB yaitu total keseluruhan nilai barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan di daerah.

PDRB baik berupa atas dasar harga berlaku maupun atas harga konstan pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah regional tertentu, atau jumlah dari nilai barang dan jasa akhir yang telah dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Menurut Mardiasmo (2002), pendapatan asli daerah adalah total penerimaan yang dihasilkan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Optimalisasi dalam penerimaan PAD hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik. PAD sebagai sumber utama penghasilan bagi daerah. PAD terbagi menjadi tiga kategori, yaitu pajak daerah, denda dan pungutan, serta penghasilan perusahaan daerah. Purwadinata & Kaluge, (2017) mengungkapkan perlunya inovasi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak. Hapsa & Khoirudin (2018) mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah mempunyai korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah daerah Istimewa Yogyakarta.

Ketiga kategori tersebut tercantum dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pasal 6 ayat 1 yang menyatakan bahwa sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah merupakan jenis pendapatan daerah yang mampu menjadi penopang.

Pada umumnya, pemerintah pusat yang akan menentukan pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Kategori kedua dari PAD adalah pungutan biaya, denda, dan lisensi. Sumber pendapatan ini terikat dengan seseorang untuk membayar jasa pelayanan tertentu yang digunakannya.

Pada prinsipnya pembebanan wilayah ini memainkan peran fiskal dan regulasi berupa pengumpulan pendapatan dan mengatur permintaan jasa dengan meminimalisasi pelanggaran yang sering terjadi dalam pelayanan publik yang bebas biaya. Regulasi tersebut dilakukan untuk menghindari penggunaan tanpa batas secara bebas terhadap fasilitas umum.

Oleh karena itu, melakukan sistem bagi hasil dengan pemerintah daerah dalam bentuk presentase tertentu untuk menggunakan atau mengelola kekayaan daerah.

H1 :PAD memiliki korelasi positif terhadap PDRB

H2 :PAD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PDRB

3. METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sempel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007). Populasi dalam penelitian ini adalah laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak 468 Kabupaten Kota yang ada di Indonesia untuk tahun 2010 sampai 2013.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2007). Prose-

dur untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini digunakan *Purposive Sampling*. Sampel diambil berdasarkan 10 daerah dengan laju pertumbuhan PAD tertinggi dan 10 daerah dengan laju pertumbuhan PAD yang terendah.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut diambil dan bersumber dari dokumen Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tahun 2009 – 2013.

1) Uji Normalitas

Dilakukan untuk mengetahui apakah residual yang dihasilkan oleh model terdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini residual normalitas diuji dengan uji Jarque-Bera. dengan hipotesis. Pengambilan keputusan pada uji Jarque-Bera adalah jika nilai probabilitas Jarque-Bera lebih besar dari nilai kritis, maka data berdistribusi normal (Kusuma, 2012).

2) Uji Korelasi

Analisis korelasi antar dua variabel digunakan untuk mengetahui keeratn hubungan antara dua variabel dan apakah dua variabel yang dianalisis berkorelasi atau tidak berkorelasi secara statistik. Jika diduga bahwa suatu variabel mempunyai korelasi positif dengan variabel yang lain, maka pengujian dilakukan satu sisi yang rumusan hipotesisnya sebagai berikut (Algifari, 2013).

H0 : $\rho \leq 0$ (tidak berkorelasi positif)

H1 : $\rho \geq 0$ (terkorelasi positif)

Penafsiran terhadap koefisien korelasi untuk mengetahui kuatnya hubungan antara variabel-variabel akan dikonsultasikan dengan tabel intrepretasi nilai koefisien. Tabel nilai korelasi dideskripsikan seba-

gaimana dalam tabel 1 berikut (Sugiyono, 2007).

Tabel 1. Nilai Korelasi

Nilai Korelasi	Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1, 00	Sangat Kuat

3) Uji Regresi

Dalam penelitian ini digunakan regresi data panel. Data dengan karakteristik panel adalah data yang berstruktur *time series* sekaligus *cross section*. Data semacam ini dapat diperoleh dengan mengamati serangkaian observasi *cross section* pada suatu periode tertentu. Ariefianto (2012) dalam penelitian ini digunakan data panel. Terdapat tiga pendekatan dalam membuat regresi panel data, yaitu:

a. Common Effect

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu maka bisa menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel. Pada model ini digabungkan data *cross-section* dan data *time series*. Kemudian digunakan metode OLS terhadap data panel tersebut. Dalam pendekatan ini diasumsikan bahwa perilaku data antar individu sama dalam berbagai kurun waktu. Persamaan untuk *common effect* sebagai berikut (Gujarati, 2004):

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it}$$

b. Fixed Effect

Pendekatan *fixed effect* didasarkan adanya perbedaan intersep

antara individu, namun intersep antar waktu sama (*time invariant*). Disamping itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar individu dan antar waktu. Persamaan untuk *fixed effect* sebagai berikut (Gujarati, 2004):

$$Y_{it} = \beta_{1i} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + u_{it}$$

Pada metode *fixed effect*, estimasi dapat dilakukan dengan tanpa pembobot (*no weighted*) atau *Least Square Dummy Variabel (LSDV)* dan dengan pembobot (*cross section weight*) atau *General Least Square (GLS)*. Tujuan dilakukannya pembobotan adalah untuk mengurangi heterogenitas antar unit *cross section*. Penggunaan model ini tepat untuk melihat perubahan perilaku data dari masing-masing variabel sehingga data lebih dinamis dalam menginterpretasi data (Gujarati, 2004).

c. Random Effect

Pendekatan ini digunakan jika berkurangnya derajat kebebasan yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Dalam model ini diestimasikan data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Diasumsikan pula bahwa setiap individu mempunyai perbedaan intersep, dimana intersep adalah variabel random. Persamaan untuk *random effect* sebagai berikut (Gujarati, 2004):

$$Y_{it} = \beta_{1i} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + u_{it}$$

Uji Spesifikasi Model

1) Uji Chow

Adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah model yang digunakan adalah *common effect* atau *fixed effect*. Sementara itu

hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah (Kusuma, 2012):

$$\begin{aligned} H_0 & : \text{Common Effect} \\ H_1 & : \text{Fixed Effect} \end{aligned}$$

Apabila hasil probabilitas *Cross-Section* F kurang dari nilai kritis maka H_1 diterima. Sedangkan Apabila hasil probabilitas *Cross-Section* F lebih dari nilai kritis maka H_1 ditolak.

2) Uji Hausman

Digunakan untuk menentukan apakah menggunakan model *fixed effect* atau *random effect* Sementara itu hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah (Kusuma, 2012) :

$$\begin{aligned} H_0 & : \text{Fixed Effect} \\ H_1 & : \text{Random Effect} \end{aligned}$$

Uji ini menggunakan distribusi *chi-square* dimana apabila probabilitas pabila hasil probabilitas *Cross-Section Random* kurang dari nilai kritis maka H_0 diterima. Sedangkan Apabila hasil probabilitas *Cross-Section Random* lebih dari nilai kritis maka H_1 ditolak.

3) Uji Lagrange Multiplier

Digunakan untuk menentukan apakah menggunakan model *common effect* atau *random effect*. Sementara itu hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah (Kusuma, 2012):

$$\begin{aligned} H_0 & : \text{Common Effect} \\ H_1 & : \text{Random Effect} \end{aligned}$$

Apabila nilai LM hitung $>$ *Chi squared* tabel maka model yang dipilih adalah *Random Effect*, dan sebaliknya apabila nilai LM hitung $<$ *Chi Squared* tabel maka model yang dipilih adalah *Common Effect*.

4) Uji signifikan koefisien

Pengujian ini dilakukan untuk melihat signifikansi berpengaruh individual dari variabel-variabel in-

dependen dalam model terhadap variabel dependennya. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan nilai kritis. Nilai kritis ditentukan dengan menggunakan tabel distribusi t. Penentuan nilai kritis didasarkan pada tingkat signifikansi (α) yang digunakan. Selain itu, penentuan nilai kritis pengujian adalah memperhatikan derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang besarnya $df = n-k$ (Algifari, 2013). Jika nilai t statistik $>$ t tabel, maka signifikan. Jika nilai t statistik $<$ t tabel, maka tidak signifikan

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dengan bantuan *Histogram-Normality Test Jarque-Bera* pada Eviews 7 dapat dilihat hasilnya pada gambar 2.

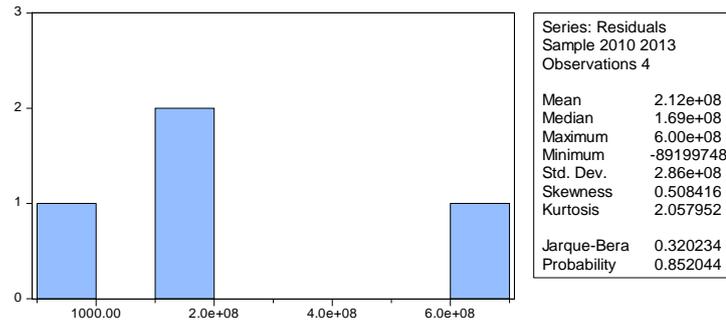
Berdasarkan gambar 2, dapat ditunjukkan oleh nilai probabilitas *Jarque-Bera* sebesar 0.852044. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari taraf nyata 5%. Jadi data tersebut layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Pengujian

Hasil uji korelasi digunakan untuk melihat hubungan antara PAD dengan Pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari PDRB. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 2.

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Laju PDRB menghasilkan nilai 0.5763. Nilai 0.5763 berarti korelasi yang sedang antara PAD dan laju PDRB. Semakin tinggi laju PAD, akan meningkatkan laju PDRB.

Pengujian tingkat signifikansi melalui uji t, diperoleh nilai t tabel dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) 5% sebesar 1.645. Nilai t statistik pada pengujian ini sebesar 3.285526. Berarti t statistik lebih besar daripada t tabel, maka ada korelasi yang signifikan antara laju PAD dengan laju PDRB.



Gambar 2. Uji Normalitas
Sumber : Olah Data Eviews

Tabel 2. Hasil Uji Korelasi

Daerah tertinggi			Daerah terendah		
	PAD	PDRB		PAD	PDRB
PAD	1	0.5763	PAD	1	-0.5141
PDRB	0.5763	1	PDRB	-0.5141	1
Coefficient	1853.153		Coefficient	5764.480	
Std. Error	564.0354		Std. Error	2623.424	
t.Statistic	3.285526		t.Statistic	2.197312	
Prob.	0.0303		Prob.	0.0929	

Sumber : Olah Data Eviews

Sedangkan pada pengujian di daerah terendah menunjukkan bahwa hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Laju PDRB di daerah–daerah tersebut menghasilkan nilai 0.5141. Nilai 0.5141 berarti korelasi yang sedang antara PAD dan laju PDRB. Tanda positif menunjukkan hubungan yang searah. Semakin tinggi laju PAD maka akan meningkatkan laju PAD maka akan meningkatkan laju PDRB. Pengujian tingkat signifikansi melalui uji t, diperoleh nilai t tabel dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) 5% sebesar 1.645. Nilai t statistik pada pengujian ini sebesar 2.197312. Berarti t statistik lebih kecil daripada t tabel, maka terdapat korelasi yang signifikan antara PAD dengan PDRB.

Dalam analisis data panel terdapat tiga pendekatan yang digunakan, yaitu *common effect*, *fixed effect* dan *random effect*. Setelah dilakukan pengujian

dengan metode tertimbang (*cross section weight*), maka hasil yang diperoleh ditunjukkan pada tabel 3.

Penentuan Teknik Analisis Model Data Panel

1) Uji Chow

Pertama data panel diesmitasi menggunakan efek spesifikasi *fixed*. Uji yang dilakukan yaitu uji Chow. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah sebaiknya model menggunakan *fixed effect* atau *common effect*.

$$H_0 : \text{Common Effect}$$

$$H_1 : \text{Fixed Effect}$$

Apabila hasil probabilitas *Cross-Section F* kurang dari 0,05 maka H_1 diterima. Sehingga Model menggunakan *fixed effect*. Hasil dari estimasi menggunakan efek spesifikasi *fixed* ditunjukkan pada tabel 4.

Tabel 3. Hasil Estimasi

Variabel	Koefisien		
	Common Effect	Fixed Effect	Random Effect
C	-11226031	-11226031	-11226031
PDRB	2705.701	2705.701	2705.701
DAERAH TERTINGGI			
_GUNUNGSITOLI—C		-9.31E-10	0.000000
_SOLOK.SELATAN—C		-9.31E-10	0.000000
_LUBUKLINGGAU—C		-9.31E-10	0.000000
_KEPULAUAN.ANAMBAS—C		-9.31E-10	0.000000
_TANJUNG.BALAI—C		-9.31E-10	0.000000
_BELITUNG.TIMUR—C		-9.31E-10	0.000000
_HALMAHERA.UTARA—C		-9.31E-10	0.000000
_TANGERANG.SELATAN—C		-9.31E-10	0.000000
_BOLAANGMONGONDOW.T—C		-9.31E-10	0.000000
_LABUHAN.BATU.SELATAN—C		-9.31E-10	0.000000
T statistik	4.885896	4.404087	4.404087
DAERAH TERENDAH			
C	1.07E+08	1.07E+08	1.07E+08
PDRB	-4735.472	-4735.472	-4735.472
_BANGKA.SELATAN—C		2.98E-09	0.000000
_BINTAN—C		2.98E-09	0.000000
_MAPPI—C		2.98E-09	0.000000
_KARIMUN—C		2.98E-09	0.000000
_FAK-FAK—C		2.98E-09	0.000000
_MANOKWARI—C		2.98E-09	0.000000
_SARMI—C		2.98E-09	0.000000
_KEPULAUAN.ARU—C		2.98E-09	0.000000
_SORONG—C		2.98E-09	0.000000
_BULONGAN—C		2.98E-09	0.000000
T statistik	-4.152137	-3.742686	-3.742686

Sumber : Olah Data Eviews

Berdasarkan hasil tersebut hasil probabilitas *Cross-Section F* sebesar 0.0000 sehingga H_1 ditolak. Maka model *pooled effect* adalah model yang sebaiknya digunakan.

Tabel 4. *Redundant Fixed Effects Tests*

Effect Test	Probabilitas daerah tertinggi	Probabilitas daerah terendah
Cross-section F	1.0000	1.0000

Sumber : Olah Data Eviews

2) *Correlated Random Effect-Hausman Test*

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model *random effect* lebih baik digunakan dari *fixed effect*.

$$H_0 : \text{Fixed Effect}$$

$$H_1 : \text{Random Effect}$$

Apabila hasil probabilitas *Cross-Section F* lebih dari 0,05 maka H_1 diterima. Sehingga model menggunakan *random effect*. Hasil dari estimasi menggunakan efek spesifikasi *random* adalah sebagai berikut:

Tabel 5. *Correlated Random Effects - Hausman Test*

Effect Test	Probabilitas daerah tertinggi	Probabilitas daerah tertinggi
Cross-section	1.0000	1.0000
Random		

Sumber : Olah Data Eviews

Berdasarkan hasil tersebut probabilitas *Cross-Section random* sebesar 0.0000 sehingga H_0 diterima. Maka model *random effect* adalah model yang sebaiknya digunakan. Dari hasil uji spesifikasi diatas, maka model yang sebaiknya digunakan estimasi dengan *Random Effect Model*.

3) *Langrange Multiplier*

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model *common effect* lebih baik digunakan dari *random effect*.

$$H_0 : \text{Common Effect}$$

$$H_1 : \text{Random Effect}$$

Apabila nilai LM hitung > *Chisquared* tabel maka model yang dipilih adalah *Random Effect*, dan sebaliknya apabila nilai LM hitung < *Chi Squared* tabel maka model

yang dipilih adalah *Common Effect*. Hasil dari estimasi menggunakan efek spesifikasi *random* ditunjukkan pada tabel 6.

Tabel 6. *Lagrange Multiplier*

Effect Test	T. Tabel	Nilai LM hitung tertinggi daerah tertinggi	Nilai LM hitung daerah terendah
Chi - square	3.84	4.321	4.321

Sumber : Olah Data Eviews

Berdasarkan hasil tersebut nilai LM hitung sebesar 4.321 sehingga H_1 diterima. Maka model *random effect* adalah model yang sebaiknya digunakan.

Uji Signifikansi

Hasil pengujian signifikansi pada dua kluster daerah tersebut dapat dilihat pada tabel 7 berikut.

Tabel 7. Hasil Uji Signifikansi

Variabel	Nilai T tabel	Nilai T statistik	
		Daerah tertinggi	Daerah terendah
PDRB	1.645	4.404087	- 3.742686

Sumber : Olah Data Eviews

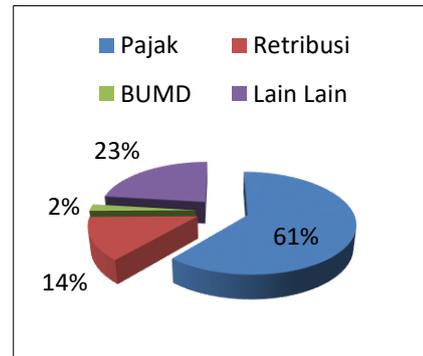
Dari kedua hasil tersebut menunjukkan bahwa di daerah tertinggi nilai T statistik lebih besar daripada nilai T tabel, artinya PAD berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Namun, di daerah terendah nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel, artinya PAD tidak berpengaruh signifikan pada PDRB.

Pembahasan

Dari hasil pengujian korelasi antara laju pertumbuhan PAD dan laju pertumbuhan PDRB di dua kategori daerah dengan laju pertumbuhan PAD tertinggi menunjukkan bahwa keeratan hubungan yang sedang dan bernilai positif serta berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB. Hal ini berarti apabila nilai PAD naik maka akan meningkatkan PDRB.

Apabila dilihat dari sumber-sumber PAD, pajak daerah memberi-

kan proporsi yang besar bagi PAD seperti tersaji pada gambar 3 berikut.



Gambar 3. Kontribusi Sumber-Sumber PAD

Sumber : Olah Data Excel

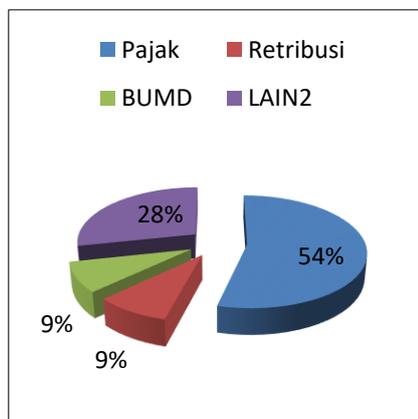
Pada gambar 3 terlihat jelas bahwa pajak daerah mendominasi perolehan PAD sebesar 60%. Pajak memiliki pengaruh dua arah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, seperti halnya pedang bermata dua. Di sisi lain penerimaan pajak yang tinggi dapat mendorong suatu daerah untuk meningkatkan belanja-belanja pemerintah yang dapat mendorong perekonomian hingga terciptanya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian Hariyadi dan Yasa, pengaruh PAD terhadap PDRB pada kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam kurun waktu 2008–2012 yang cukup signifikan berarti kemampuan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah terlihat cukup baik.

Menurut Setyawati & Hamzah, (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa peningkatan PAD berjalan searah dengan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan PAD akan menambah jumlah PDRB yang menjadi dasar dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi daerah. Kenaikan PAD dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas sektor-sektor yang terkait dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi seperti sektor industri perdagangan, sektor jasa dan lain-lain.

Berbanding terbalik dengan daerah dengan laju PAD tertinggi, di daerah dengan laju PAD terendah memiliki hubungan negatif signifikan dan pengaruh negatif namun kurang signifikan. Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa PAD diperoleh dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari berbagai sumber tersebut, penarikan pajak daerah yang mendominasi yang tersaji pada gambar 4 berikut.



Gambar 4. Kontribusi PAD di daerah dengan laju pertumbuhan PAD terendah

Sumber : Olah Data Excel

Dari gambar 4 diatas menunjukkan bahwa 50% lebih PAD diperoleh dari pajak. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa pajak seperti pedang bermata dua.

Pengenaan tarif pajak yang tinggi pada masyarakat akan berdampak pada menurunnya jumlah konsumsi masyarakat. Begitu pula sebaliknya. Tingginya tarif pajak akan berdampak langsung pada *disposable income* masyarakat.

Ketika tarif pajak dinaikkan, maka *disposable income* akan menjadi turun, karena masyarakat perlu membayar beban pajak yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan menurunnya *disposable income*, maka konsumsi masyarakat pun akan menurun pula. Tu-

runnya konsumsi agregat masyarakat akan berdampak pada turunnya pendapatan nasional ekuilibrium, demikian pula sebaliknya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Prakarsa (2014) bahwa dari sumber yang tercermin bahwa pungutan pajak dan retribusi daerah justru berakibat pada output daerah yang tercermin pada PDRB yang diperoleh berbagai sektor pendapatan di kabupaten/kota belum berjalan secara maksimal. Menurut Lewis dalam Ahyani (2010) belum efektifnya berbagai peraturan yang dilakukan pemerintah dapat menunjukkan tidak adanya hubungan positif antara berbagai pungutan baru itu dengan keseriusan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas layanan publik.

Selain itu, output yang dihasilkan juga harus dikurangi dengan biaya-biaya atas barang atau jasa. Dengan kurang maksimalnya PDRB yang dihasilkan suatu daerah tentu akan berpengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut karena tingkat pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari tingkat PDRB.

Jadi sangat penting untuk pemerintah daerah mengoptimalkan sektor pendapatannya agar menghasilkan *output* yang maksimal di setiap sektornya.

5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN BATASAN

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, dihasilkan bahwa terdapat hubungan dan pengaruh positif antara PAD dan PDRB di 10 daerah dengan laju pertumbuhan PAD tertinggi.

Sedangkan berbanding terbalik dengan hasil yang diperoleh di 10 daerah dengan laju pertumbuhan PAD terendah yang memiliki hubungan negatif signifikan dan pengaruh negatif kurang signifikan. Kedua hal ini sama-sama disebabkan oleh faktor pajak daerah yang mendominasi dalam perole-

han PAD. Untuk meningkatkan pengaruh positif PAD terhadap PDRB pemerintah perlu meningkatkan sumber-sumber PAD lainnya.

Agar PAD yang tinggi tidak hanya sebagai sarana untuk berlomba-lomba dalam peningkatan PAD, namun juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sebagian daerah yang sebagian besar PAD nya diperoleh dari pajak daerah memberikan dampak negatif yang tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah diharapkan membuat suatu kebijakan agar pajak dapat memberikan multiplier *positif effect* yang lebih besar.

Pemerintah dapat membangun berbagai fasilitas umum yang digunakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan. Selain itu, pemerintah harus mengembangkan aset dan potensi yang dimiliki, dengan menghidupkan dan mengembangkan kembali BUMD.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, W. (2010). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dan Pengganguran Pasca Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Tengah)*. Universitas Brawijaya.
- Algifari. (2013). *Statistika Induktif: untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Ariefianto, M. D. (2012). *Ekonometrika esensi dan aplikasi dengan menggunakan EViews*. Jakarta: Erlangga.
- Cooray, A. V. (2009). Government expenditure, governance and economic growth. *Comparative Economic Studies*, 51(3), 401–418.
- Fadly, F. (2016). Adakah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah? *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 16(2), 63–74.
- Gujarati, D. N. (2004). Basic Econometrics 4ed. In *The McGraw-Hill Companies*.
- Hapsa, S., & Khoirudin, R. (2018). Analisis Pertumbuhan Ekonomi D.I. Yogyakarta Tahun 2008-2016. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 18(2), 151–168.
- Jaya, I. P. N. P. K., & Dwirandra, A. A. N. B. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 7(1), 79–92.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategis dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Kusuma, D. R. (2012). *Modul Praktikum Eviews*. Yogyakarta.
- Lin, J. Y., & Liu, Z. (2000). Fiscal decentralization and economic growth in china. Economic development and cultural change. *Chicago*, 49, 263–275.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Prakarsa, F. D. (2014). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi kasus di Kabupaten Kota Jawa Timur Tahun 2008- 2012). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 2(2).
- Purwadinata, S., & Kaluge, D. (2017). Apakah Inovasi Pajak Daerah Memperlambat Daya Inovasi Pemerintah Daerah dalam

- Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal? *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 17(2), 43–56.
- Setyawati, A., & Hamzah, A. (2007). Analisis Pengaruh Pad, Dau, Dak, Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 211–228.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Vazques, J. M., & McNab, R. M. (1997). Fiscal Decentralization Economic Growth, and Democratic Governance. *USAID Conference On Economic Growth, and Democratic Governance Washington*, 4–20. Washington: USAID Conference On Economic Growth, and Democratic Governance Washington.
- Vazquez, J. M., & Rider, M. (2005). Fiskal Decentralitation Economics Growth: A Comparative Study of China and India. In *International Center for Public Policy Working Paper Series* (No. 0519).
- Zhang, T., & Zou, H.-F. (1998). Fiscal Decentralization, Public Spendig, and Economic Growth in China. *Journal of Public Economics*, 67, 221–240.
- Zouhaier, H. (2012). Institutions, Investment and Economic Growth. *International Journal of Economics and Finance*, 4(2), 152–162.